

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN FUNGSINYA
SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

**IRMA SANI PANE
NPM : 99 830 0370**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA MEDAN**

Nama Mahasiswa : **IRMA SANI PANE**

No.Stambuk : **99 830 0370**

Jurusan : **AKUNTANSI**



Pembimbing I

Drs.H.Arifin Lubis,MM,Ak

Pembimbing II

Dra. Hj. Rosmaini, Ak

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dra. Hj. Retnawati siregar

Dekan



Drs. H. Syariandy,MSi

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Tanggal Lulus** :

RINGKASAN

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA

(Dibawah Bimbingan DRS. H. ARIFIN LUBIS, MM,Ak, Sebagai Pembimbing I
DRA. Hj. ROSMAINI,Ak, Sebagai Pembimbing II)

Anggaran Rugi Laba merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran dapat dipakai untuk mengukur tingkat efektivitas suatu pekerjaan dan bagi manajemen anggaran merupakan alat untuk menjalankan fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan.

Dalam penyusunan anggaran harus dibentuk panitia budget yang beranggotakan dari masing-masing bagian pemasaran, produksi, perbelanjaan, serta personalia dan diketuai oleh seorang pimpinan. Priode penyusunan anggaran dilakukan melalui penyusunan kelender anggaran, dimana anggaran defenitif harus sudah ditetapkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan sebelum priode anggaran tiba dan diuraikan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masing-masing bagian dalam merencanakan laba, serta ketaatan terhadap jadwal yang telah dibuat.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.23 tahun1994 dan dengan akte notaris, mulai tanggal 1 Agustus 1994 Perusahaan Umum Listrik Negara berubah status menjadi PT. PLN (Persero), yang merupakan Badan Usaha

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/24

Milik Negara (BUMN) dengan kegiatan atau usaha dalam hal pelayanan jasa dibidang kelistrikan yang meliputi pembangkit, pentransmision serta pendistribusian listrik kepada konsumen atau masyarakat.

Adapun masalah yang dibahas dan diteliti adalah bagaimana perusahaan menyusun anggaran dan bagaimana peranan anggaran pendapatan sebagai alat Pengawasan pada PT. PLN (Persero). Dari analisis dan evaluasi atas data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, penulis berkesimpulan:

- 1 Anggaran yang terdapat pada PT.PLN (Persero) ada dua yaitu Anggaran Operasi dan Anggaran Investasi, anggaran disusun untuk jangka waktu satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI) harus disampaikan selambatnya pada bulan Juli ke PLN Wilayah untuk dievaluasi dan diadakan koreksi seperlunya, kemudian diteruskan ke PLN Pusat.
- 2 Anggaran menggambarkan hasil segala kegiatan yang ingin dicapai, fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pada perusahaan cukup baik, karena anggaran dipergunakan sebagai batasan untuk pos penerimaan dan pos pengeluaran. Dengan adanya fungsi anggaran sebagai batasan terhadap penerimaan dan pengeluaran maka setiap bagian akan berusaha seefektif mungkin agar mencapai target yang maksimal.
- 3 Realisasi anggaran PT.PLN (Persero) dituangkan dalam dua bentuk laporan yaitu :
 1. Laporan Realisasi Anggaran Tunai (RAT)

Laporan tentang penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas sehubungan dengan kegiatan operasi dan investasi perusahaan. Laporan disusun setiap

bulan berdasarkan kas yang diterima atau yang dikeluarkan dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

2. Laporan Pembukuan

Laporan yang sama dengan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Laporan disusun setiap bulan dan dilaporkan tiap triwulan. Penyusunan laporan pembukuan ini didasarkan pada kebijaksanaan akuntansi yang dianut oleh perusahaan baik kegiatan operasi maupun investasi.

3. Sistem dan Prosedur penyusunan anggaran operasi yang dilakukan perusahaan berdasarkan pada anggaran yang direncanakan sehingga dapat diawasi secara langsung. Dari segi perencanaan, sistem dan prosedur penyusunan anggaran pendapatan memberi manfaat, dapat diketahuinya keadaan keuangan perusahaan sedini mungkin. Dan dari segi pengawasan, dapat diawasinya secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR/TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Hipotesis.....	3
D. Luas dan Tujuan Penelitian.....	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	4
F. Metode Analisis.....	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS.....	6
A. Pengertian, Jenis dan Fungsi Anggaran.....	6
B. Pengertian Pengawasan	14
C. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan.....	15
D. Laporan Anggaran Pendapatan	18
BAB III : PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA MEDAN.....	21
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	21
B. Penyusunan Anggaran Pendapatan.....	31
C. Realisasi Anggaran Pendapatan.....	51
D. Peranan Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengawasan.....	52

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI.....	55
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap perusahaan mempunyai beberapa tujuan, dan tujuan utama adalah untuk memperoleh laba demi terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangannya dimasa yang akan datang. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan proses pencapaian tujuannya, perusahaan harus meningkatkan mutu manajemen sehingga manajemen dapat beroperasi seefisiensi mungkin. Setiap usaha akan lebih berhasil apabila didukung oleh adanya sistem perencanaan, pengkoordinasian serta pengawasan pada perusahaan tersebut.

Anggaran merupakan rencana tertulis yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Di samping itu anggaran juga dapat dipakai untuk mengukur tingkat efektivitas suatu pekerjaan. Bagi pihak manajemen anggaran merupakan alat untuk menjalankan fungsi perencanaan maupun fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan, anggaran direncanakan dan disusun menjadi satu pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berpedoman dari anggaran inilah manajemen dapat melihat adanya tindakan penyimpangan yang terjadi. Mengingat pentingnya peranan anggaran tersebut, maka manajemen harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan, terutama dimasa yang akan datang.

Kegagalan dalam menetapkan anggaran yang baik pada suatu perusahaan akan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas, sehingga sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan akan tergambar dalam suatu anggaran laba rugi atau anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan alat manajemen dalam bidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan yang sistematis untuk mengetahui adanya penyimpangan dan juga akan dapat meningkatkan tanggung jawab setiap karyawan, karena seluruh unsur yang terkait dalam perusahaan mengetahui tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Anggaran pendapatan yang telah disusun sebaik mungkin, belum tentu dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, antara lain tingkat keandalan sistem akuntansi yang digunakan, kualitas manajemen serta konsisten dalam penyusunan anggaran itu sendiri.

Memahami begitu pentingnya peranan suatu anggaran laba rugi, penulis merasa tertarik untuk mendalami bidang ini. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Medan).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA (MEDAN)”

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis melakukan penelitian pendahuluan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ditemukan masalah yang dihadapi perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Bagaimana peranan anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Medan)”.

C. Hipotesis

Perumusan hipotesis adalah merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian, sebab hipotesis dipergunakan sebagai dasar pengumpulan data dan penarikan kesimpulan.

Menurut Winarno Surachmad “ *Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar.* ”¹

Adapun hipotesis yang dikemukakan atas rumusan masalah di atas adalah “Apabila anggaran pendapatan direncanakan secara baik maka akan dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Medan).”

D. Luas dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan bidang akuntansi sebenarnya sangat luas, namun karena keterbatasan dana, waktu dan kemampuan penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya memilih peranan anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan

¹ Winarno Surachmad, *Pengantar penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi keempat, Tarsito,Bandung, 1994, hal. 39

pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Medan).

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses penyusunan anggaran serta bagaimana pengawasan yang dilakukan pada perusahaan tersebut.
2. Mencoba membuat usulan berupa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi perusahaan sehubungan dengan penerapan anggaran sebagai alat pengawasan.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diadakan riset meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Pada penelitian kepustakaan ini yang penelitiannya dilakukan berdasarkan teori yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, majalah ilmiah lainnya bulletin dan sebagainya yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan pembahasan skripsi ini untuk memperoleh data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Pada penelitian lapangan ini yaitu dengan melakukan kunjungan ke objek yang diteliti, guna mendapatkan data primer langsung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Pengamatan (observation) yaitu dengan melakukan peninjauan langsung pada objeknya.
- b. Wawancara (interview) yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di dalam perusahaan.
- c. Daftar pertanyaan (questionnaire) yaitu dengan menyusun beberapa daftar pertanyaan secara tertulis untuk diajukan kepada responden perusahaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

F. Metode Analisis

Di dalam penganalisan data, penulis akan menggunakan dua metode :

1. Dengan metode Deskriptif, data disusun dikelompokkan kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (Medan).
2. Dengan metode Komparatif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kebenaran umum untuk diperbandingkan dengan fakta dalam praktek sebagai kenyataan khusus, sehingga diperoleh gambaran penyimpangan maupun persesuaian diantara keduanya.

Dari kedua metode analisis di atas penulis akan mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menyusun serta memberikan saran sebagai jalan keluar atau pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian , Jenis dan Fungsi Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Semakin kompleksnya masalah menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut anggaran. Pengertian anggaran menurut *My, Jain PK Khan* adalah : *“A budget is defined as a comprehenship and coordinated plan expressed in financial term, for the operation and resources of an enterprise for same specified period in future.”*² Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam angka untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Suatu rencana dikatakan baik apabila disusun dengan fakta-fakta yang up to date dan realable yang dapat mendukung rencana dengan menggunakan asumsi-asumsi yang dapat diterima secara rasional dan melibatkan semua lapisan manajemen.

Dalam penyusunan rencana hendaknya dibentuk suatu tim khusus perencanaan yang anggotanya terdiri dari semua lapisan manajemen. Tim ini akan merumuskan

² My, Jain PK Khan, *Management Accounting and Financial Management*, Fithth Edition, Mac. Graw-Hill, Publishing C. Ltd. 1991, New Delhi, hal. 137.

rencana kemudian disajikan dalam bentuk Budget (Anggaran). Untuk menyusun anggaran diperlukan mekanisme perencanaan dan pengawasan yang terpadu yang disebut dengan anggaran perusahaan.

Anggaran perusahaan menurut *Adi saputra* sering disebut dengan istilah antara lain :

1. “ *Business Budget.*
2. *Propit Planing and Control*
3. *Comprehensive Budgeting*
4. *Managerial Budgeting*
5. *Business Budgeting and control.*”³

Pengertian anggaran laba (anggaran operasional) yang dikemukakan oleh *Munandar* adalah :

“ *Anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang, kegiatan tersebut dibagi dalam dua sektor yaitu sektor penghasilan dan sektor biaya sehubungan dengan penghasilan tersebut.*”⁴

2. Jenis-Jenis Anggaran

Dilihat dari segi waktu *Horngren* membedakan anggaran sebagai berikut :

³ *Adi Saputra Gunawan, Asri Marwan, Anggaran Perusahaan*, Edisi Revisi II, Cetakan Kelima, Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1996.

⁴ *M. Munandar, Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, BPFE-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, hal. 23.

- a. *“Capital budget*
- b. *Master budget*
- c. *Continous budget.”*⁵

Capital budget adalah anggaran untuk proyek-proyek tertentu, jangka waktunya lebih dari satu tahun.

Master budget adalah anggaran yang mengkonsolidasikan seluruh rencana tahunan perusahaan, jangka waktunya satu tahun.

Continous budget adalah merupakan anggaran triwulan atau bulanan.

Berdasarkan sifatnya *E.Hartanto* membedakan anggaran sebagai berikut:

- a. *“Apropriation budget*
 - b. *Performance budget*
 - c. *Fixed budget*
 - d. *Flexible budget.”*⁶
- ad. a. Aproptiation Budget.*

Anggaran ini bertitik tolak dari pengeluaran yang diperbolehkan sebatas anggaran maksimum, misalnya biaya operasi tertentu tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

ad. b. Performance Budget

Performance budget merupakan anggaran yang didasarkan pada aktivitas. Tidak ada

⁵ Charles T. Horngren, *Introduction to Management Accounting*, Fifth Edition, Prentice Hall, Onc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1994, hal. 150.

⁶ E. Hartanto, *Akuntansi Untuk Usahawan*, Edisi Kelima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 137.

pembatasan maksimum untuk masing-masing pos anggaran. Dari pelaksanaan kegiatan akan diadakan penilaian terhadap biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai sehingga dapat dilihat apakah pengeluaran tersebut bermanfaat atau tidak untuk memperoleh penghasilan.

ad. c. Fixed Budget.

Fixed Budget adalah anggaran yang disusun untuk jangka waktu tertentu menurut persentase kapasitas yang tertentu, jumlah jasa yang dihasilkan dan jumlah kerja yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

ad. d. Flexsibel Budget.

Dalam anggaran ini biaya tetap dan biaya variabel harus diperhatikan. Untuk setiap tingkat kegiatan terdapat norma untuk biaya yang diperlukan. Norma ini merupakan patokan bagi pengeluaran yang seharusnya pada masing-masing kegiatan ini.

Selanjutnya *Robert N. Anthony* menguraikan bahwa jenis anggaran terdiri dari:

a. "Anggaran Operasional

b. Anggaran Kas

c. Anggaran Modal." ⁷

Anggaran Operasi adalah rencana kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan berisikan elemen-elemen yang terdapat didalam laporan laba rugi.

Anggaran Kas adalah anggaran yang berisikan rencana secara terperinci tentang

⁷ Robert N. Anthony, *Akuntansi Untuk Manajemen*, Terjemahan St Dianjung, Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1991.

jumlah kas selama periode yang akan datang.

Anggaran Modal adalah Anggaran yang berisikan tentang rencana investasi dalam sumberdaya-sumberdaya besar, seperti bangunan, peralatan, proyek-proyek panjang seperti program pelatihan pegawai.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa tujuan akhir perusahaan adalah memperoleh laba, untuk mencapai tujuan maka perusahaan harus menyusun anggaran penghasilan dan anggaran biaya kemudian anggaran tersebut diawasi agar laba dapat direalisasikan.

Anggaran Operasi meliputi anggaran penghasilan dan biaya yang terdiri dari :

1. *Anggaran Penjualan.*

Anggaran ini menyangkut semua kegiatan perusahaan dibidang penjualan produksinya yang meliputi jumlah barang, harga barang, daerah penjualan dan periode penjualannya. Tujuan dari anggaran penjualan ini adalah untuk menentukan hasil penjualan yang diharapkan dapat direalisasikan pada periode yang akan datang setelah pertimbangan hal-hal berikut ini :

- a. Kapasitas perusahaan pada masa sekarang.
- b. Perubahan lingkungan, baik lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
- c. Tujuan yang ingin dicapai.
- d. Strategi rencana yang dilaksanakan.

2. *Anggaran Produksi.*

Anggaran produksi meliputi kebijaksanaan yang berhubungan dengan jumlah produksi dan kebutuhan persediaan. Dasar penyusunan anggaran produksi adalah anggaran penjualan, sebab jumlah produk yang harus diproduksi perusahaan harus disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dijual berikut tingkat persediaan awal dan akhir.

3. *Anggaran Bahan Baku.*

Anggaran bahan baku disebut juga anggaran kebutuhan, anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dengan penggunaan bahan baku untuk proses produksi periode yang akan datang. Dalam penyusunan anggaran ini harus diketahui standar pemakaian bahan baku untuk setiap produk.

Setelah anggaran bahan baku disusun, maka susunlah anggaran pembelian bahan baku. Dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku perlu diperhatikan tingkat persediaan awal dan akhir agar kualitas produksi dapat dipertahankan.

4. *Anggaran Upah Langsung.*

Tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang dan berhubungan langsung dengan proses produksi dinamai tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja ini disebut dengan biaya upah langsung. Untuk menentukan besarnya biaya yang harus dikorbankan dalam proses produksi, maka susunlah anggaran upah langsung. Anggaran ini menguraikan jumlah jam kerja, tarif upah menurut bagian, waktu dan jenis barang. Besarnya upah langsung adalah jumlah kerja yang diperlukan dikali dengan tingkat kerja per jam kerja.

5. *Anggaran Biaya Pabrik Tidak Langsung.*

Anggaran biaya pabrik tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan sangat banyak jenisnya. Biaya pabrik tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi selain bahan baku langsung dan upah langsung.

6. *Anggaran Biaya Distribusi*

Biaya distribusi adalah biaya yang diperlukan perusahaan untuk memasarkan hasil produksi. Untuk merencanakan dan mengawasi rencana tersebut perlu disusun anggaran biaya distribusi. Termasuk dalam anggaran biaya distribusi ini adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan, pendistribusian dan penyerahan produk kepada langganan.

7. *Anggaran Umum dan Administrasi.*

Semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan selain dari biaya pabrik dan biaya distribusi dikategorikan sebagai biaya umum dan administrasi. Biaya Umum dan Administrasi ini pada umumnya dikeluarkan dalam rangka pelayanan terhadap semua fungsi utama perusahaan.

8. *Anggaran Laba Rugi*

Untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan perlu disusun anggaran laba rugi berdasarkan data dari anggaran-anggaran sebelumnya yang meliputi anggaran penjualan sampai dengan anggaran biaya.

Untuk menyusun anggaran laba rugi, maka pendapatan dan biaya harus lebih dahulu direncanakan dengan baik yang dijabarkan dalam anggaran operasi. Apabila anggaran penjualan dan anggaran biaya tersebut disusun dengan cermat maka anggaran

laba rugi akan mencerminkan tafsiran keuntungan yang akan diperoleh setelah pelaksanaan anggaran.

3. Fungsi Anggaran

Anggaran dalam suatu perusahaan pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi manajemen, yaitu :

a. *Fungsi perencanaan.*

Fungsi ini meliputi penentuan tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek, aktivitas apa yang harus dilakukan, bagaimana melaksanakannya agar tujuan tersebut dapat dicapai.

b. *Fungsi koordinasi.*

Merupakan keserasian tindakan dalam bekerja dari setiap orang atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Penyusunan rencana yang terperinci (berupa anggaran) dapat mendorong terjadinya kerja sama sehingga tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

c. *Fungsi pengawasan*

Merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan..

Fungsi pengawasan merupakan penentuan apakah operasi usaha telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan mengukur dan memperbaiki pelaksanaan operasi perusahaan. Alat pengukurannya adalah budget yang

telah disusun sebelumnya dan proses pengukuran dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi. Perbandingan dilakukan pada seluruh bidang pelaksanaan disemua bagian dalam perusahaan agar dapat diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan. Untuk menyusun anggaran selanjutnya secara lebih matang dan akurat agar tujuan dapat tercapai.

B. Pengertian Pengawasan

Seorang pimpinan dalam melaksanakan pengawasan hendaklah mengerti apa yang sedang diawasinya dan kemudian jika terdapat suatu penyelewengan ataupun suatu kesalahan pimpinan harus berusaha memperbaiki dengan cara sebaik mungkin, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik pula.

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pengawasan ini penulis akan mengemukakan pendapat para sarjana di bawah ini :

Menurut *Sondang P. Siagian*, dikatakan bahwa :“ *Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaga agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.*”⁸.

Menurut *Sarwoto*, definisi pengawasan adalah sebagai berikut:

“*Pengawasan merupakan kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan*

⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1996, hal. 135.

terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.”⁹

Menurut *Manullang*, defenisi pengawadan adalah sebagai berikut :

“ Pengawasan adalah penilaian akan pekerjaan bawahan, baik yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai dengan maksud mengadakan tindakan perbaikan bila perlu agar benar-benar dapat dihasilkan tujuan yang telah digariskan.”¹⁰

Dari definisi-definisi di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan melihat, memeriksa, dan menguji apakah pekerjaan itu terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan pengawasan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari pada pelaksanaan rencana, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

Pekerjaan pengawasan merupakan fungsi pimpinan, semakin rendah tingkat pimpinan maka semakin rendah pula pekerjaan pegawai, begitu pula sebaliknya jika semakin tinggi tingkat pimpinan maka semakin tinggi pula tugasnya.

C. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan

Proses penganggaran biasanya dimulai saat para manajer menerima rencana ekonomi dan sasaran penjualan serta laba untuk tahun dapat mendatang dari manajer puncak. Rencana ini biasanya disertai dengan tabel waktu kapan budget harus diselesaikan. Rencana ekonomi dan sasaran yang ditetapkan oleh manajer puncak

⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 92.

¹⁰ M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 18.

diserahkan pada para manajer sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran. Dalam beberapa perusahaan budget ditetapkan oleh manajer puncak tanpa atau hanya sedikit saja berkonsultasi dengan manajer tingkat bawah. Akan tetapi dibanyak organisasi, budget pada awalnya dipersiapkan oleh mereka yang harus mengimplementasikannya. Rencana anggaran itu kemudian diteruskan secara hirarkhi kepada pihak atasan untuk disetujui. Cara menyusun budget dari bawah ke atas (bottom up) ini banyak manfaatnya bagi organisasi. Para supervisor dan kepala departemen tingkat bawah secara pribadi dapat mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan-kebutuhan mereka daripada manajer puncak, di samping itu juga mereka dapat lebih banyak menyarankan perincian yang lebih realistis untuk mendukung usul-usul mereka. Para manajer akan mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk menyetujui dan memenuhi budget yang telah disusun dengan partisipasi mereka sendiri dan akhirnya kepuasan biasanya lebih tinggi apabila individu turut serta secara aktif dalam mengambil keputusan mengenai diri mereka sendiri.

Untuk menentukan bagaimana yang bertugas menyusun anggaran dapat diketahui dari struktur organisasi masing-masing perusahaan. Menurut *Glen A. Welsch* pada garis besarnya tugas untuk menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada :

1. “Bagian administrasi bagi perusahaan kecil,
2. Panitia budget bagi perusahaan yang besar.”¹¹

¹¹ Glen A. Welsch, et.all, *Budgeting : Planning and Profit Control, (Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba)*, Terjemahan Purwatiningsih dan Maudy Warouw, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 67.

Bagi perusahaan kecil, karena kegiatan-kegiatan tidak terlalu kompleks, maka penyusunan anggaran dilaksanakan oleh bagian administrasi. Penunjukan bagian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di bagian administrasi terkumpul semua data-data dan informasi meliputi semua kegiatan perusahaan, baik kegiatan di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan maupun kegiatan di bidang personalia. Sebaliknya bagi perusahaan besar, disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan cukup kompleks dan beraneka ragam dengan ruang lingkup yang cukup luas harus melibatkan semua unsur yang mewakili semua bagian yang ada dalam perusahaan, yang duduk dalam panitia budget.

Pantia budget biasanya beranggotakan dari masing-masing wakil dari bagian pemasaran, produksi, pembelanjaan dan personalia yang diketuai oleh salah seorang pimpinan perusahaan. Misalnya wakil direktur umum. Panitia anggaran pelaksanaan kegiatan pembahasan-pembahasan tentang rencana-rencana kegiatan pada masa yang akan datang. Setelah ada kesepakatan bersama maka rancangan anggaran disusun sesuai dengan kondisi dan fasilitas masing-masing bagian. Dengan adanya kesepakatan bersama maka pelaksanaan anggaran nantinya akan didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan.

Rancangan anggaran yang disusun bagian administrasi pada perusahaan kecil, atau panitia anggaran pada perusahaan besar diserahkan pada pimpinan tertinggi perusahaan, untuk ditetapkan serta disahkan sebagai anggaran yang defenitif. Sebelum

disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan masih dimungkinkan untuk diadakan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap rancangan tersebut, serta pembahasan-pembahasan dengan pihak yang menyusun rancangan anggaran tersebut. Setelah disahkan, anggaran defenitif ini kemudian diserahkan kepada setiap bagian untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian dan sebagai alat pengawasan kerja.

Waktu atau periode penyusunan anggaran biasanya ditentukan melalui penyusunan kalender anggaran. Dimana anggaran defenitif harus sudah ditetapkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan sebelum periode anggaran tiba. Setelah penyusunan rancangan anggaran dan telah disahkan sebagai anggaran defenitif, panitia anggaran secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi guna membahas pelaksanaan anggaran dari waktu ke waktu serta mengadakan analisa-analisa penyimpangan serta mengadakan revisi bila dianggap perlu.

Metode penyusunan anggaran ini perlu diuraikan untuk menentukan tingkat keterlibatan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan dalam merencanakan laba serta ketaatan personil terhadap jadwal yang telah dibuat.

D. Laporan Anggaran Pendapatan

Alat pengukur kinerja keuangan berfungsi untuk memastikan apakah pelaksanaan telah berjalan seperti yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dengan demikian peranan anggaran laba sebagai alat pengukur kinerja keuangan pada

suatu perusahaan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Secara umum peranan anggaran laba dalam hubungan pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan adalah meliputi pengawasan terhadap pendapatan (revenue) dan pengawasan terhadap beban (expense). Pengukuran kinerja keuangan terhadap anggaran laba dilakukan dengan analisa penyimpangan antara anggaran, beban dan realisasinya.

Adapun fungsi laporan laba rugi sebagai alat pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan suatu norma standar pengukuran
2. Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar
3. Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan
4. Mengambil tindakan koreksi yang perlu.

Ad. 1. Menentukan suatu norma standar pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas kinerja keuangan perusahaan diperlukan suatu standar sebagai dasar bagi pelaksanaan pengukuran tersebut. Norma-norma atau standar harus ditetapkan oleh mereka yang cukup pengalaman, untuk memutuskan dengan pasti apakah pelaksanaan itu baik dan dapat diterima. Hasil yang sesungguhnya harus dilaporkan oleh bagian yang independen yakni departemen akuntansi dan dibandingkan dengan norma standar.

Ad. 2. Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar.

Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi yang dicapai perusahaan, maka akan dapat dilihat seberapa jauh terjadi penyimpangan. Selanjutnya penyimpangan dianalisa untuk mengambil tindakan perbaikan pada masa yang akan datang.

Ad.. 3. Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan

Penyimpangan yang terjadi mempunyai dua sifat yaitu mengutungkan dan merugikan.

Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya penyimpangan yaitu :

- a. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- b. Ketidak mampuan untuk membuat ramalan-ramalan pada masa yang akan datang khususnya ramalan perubahan harga.
- c. Terjadinya penyelewengan/pemborosan yang dilakukan pelaksana pekerja.
- d. Dan lain-lain.

Ad. 4. Mengambil tindakan koreksi yang perlu

Sebagai aktivitas terakhir dalam proses pengukuran kinerja keuangan adalah pengambilan tindakan koreksi yang perlu terhadap penyimpangan yang terjadi. Hal ini penting menjadi perhatian pimpinan perusahaan, sebab tindakan koreksi harus diambil pada saat yang tepat. Setelah penyebab timbulnya penyimpangan diketahui maka pimpinan perusahaan harus mengambil tindakan koreksi secepat mungkin agatujuan perusahaan dapat direalisir dan kerugian dapat dikurangi.

BAB III

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Ringkas Perusahaan

Listrik sudah menjadi sahabat manusia setelah para ilmuwan penemu seperti James Watt, Alessandro Volta, Andre Marie Ampere, serta George Sion Ohm menyingkap penemuan listrik, dan juga Thomas Alfa Edison menciptakan bola lampu pijar tahun 1879.

Listrik dengan aneka ragam manfaatnya telah mendatangkan kehidupan baru dan meriah, mengalirkan hubungan antara manusia dan mesin, sehingga kini terbentuk suatu kerja sama yang baik antara manusia, mesin dan listrik dalam melaksanakan kerja dan mencapai prestasi.

a. Listrik Sebelum kemerdekaan

Sejarah kelistrikan mulai ada di wilayah Indonesia tahun 1893 di daerah Batavia (Jakarta sekarang), maka 30 tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya dibangun di tanah pertapakan Kantor PLN Cabang Medan yang sekarang di Jalan Listrik No. 12 Medan, dibangun oleh NV NIGEM/OGEM Perusahaan Swasta Belanda. Kemudian menyusul pembangunan kelistrikan di Tanjung Pura (1927), Sibolga (1927), Sibolga (NV ANIEM), Brastagi dan Tarutung

(1929), Tanjung Balai (1931) milik Gemeente – Kotapraja, Labuhan Bilik (1936) dan Tanjung Tiram (1937).

Masa pendudukan Jepang, perusahaan listrik (DENKO KYOKU) berada di bawah pengawasan tentara Jepang dengan mendatangkan tenaga-tenaga pengawasan dari Jepang. Tetapi pada dasarnya Jepang hanya mengambil alih pengelolaan perusahaan listrik milik swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan perluasan jaringan daerah kerjanya dibagi menjadi Perusahaan Listrik Sumatera, Perusahaan Listrik Jawa dan seterusnya sesuai dengan struktur organisasi pemerintah tentara Jepang waktu itu.

b. Listrik di Awal Kemerdekaan sampai 1965

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Kesatuan Aksi Karyawan mengambil alih perusahaan listrik bekas milik swasta Belanda dari tangan tentara Jepang. Aksi ambil alih itu selesai bulan Oktober 1945 dan perusahaan listrik yang sudah diambil alih itu diserahkan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengenang peristiwa ambil alih itu, maka dengan penetapan Pemerintah No. 1 sampai dengan 45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik. Tetapi belakangan Hari Listrik disatukan dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.

Pada tahun 1945 lahirlah jawatan listrik seperti KEPPRES No.1/SD/45/27 Oktober 1945, maka perusahaan listrik berada dibawah naungan PUTL (Pekerjaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Setelah beberapa kali melakukan perubahan nama struktur

organisasi, maka pada tahun 1972 Pemerintah dengan PP No.18 tahun 1972 menetapkan status Jawatan Listrik dan Gas menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (yang lazim disebut PLN). Dengan hak dan tanggungjawab untuk membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh Indonesia. Kemudian dengan dikeluarkan Peraturan Menteri PUTL No.013/PRT/1975 tanggal 9 September 1975, pembagian daerah kerja PLN diubah. Istilah eksploitasi diubah dengan nama Wilayah. PLN untuk pembangunan diubah menjadi PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING). Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.23 tahun 1994 dan dengan akte notaries, mulai tanggal 1 Agustus 1994 Perusahaan Umum Listrik Negara berubah status menjadi PT. PLN (Persero).

2. Ruang Lingkup Kegiatan

PLN mempunyai fungsi yaitu pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik kepada masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Membangun pembangkit, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dan pusat-pusat pembangkit, jaringan-jaringan transmisi dan distribusi milik perusahaan sesuai dengan nama yang disebut.
- b. Membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan di waktu-waktu yang akan datang termasuk pembelian-pembelian tenaga listrik yang diperbolehkan sesuai dengan norma yang sehat di bidang industri.
- c. Peraturan-peraturan yang selanjutnya diajukan kepada menteri guna mendapatkan

keputusan dan penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PLN yang merupakan suatu Badan Umum Milik Negara (BUMN) memiliki kegiatan atau usaha dalam hal pelayanan jasa dibidang kelistrikan. Usaha ini meliputi pembangkitan, pentransmision serta pendistribusian listrik kepada konsumen atau masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi dengan mengusahakan keuntungan sehingga dapat membiayai pengembangan, pembangkitan dan pentransmision serta pendistribusian tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan pendistribusian tenaga yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi di wilayah kerjanya.

Melihat kemajuan dan perkembangan penduduk, PLN juga selalu berusaha untuk memenuhi segala permintaan sehingga didirikan cabang-cabang dan ranting-ranting diseluruh pelosok tanah air. Salah satu PLN tersebut adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara yang berkedudukan di Jalan K.L.Yos Sudarso Medan. Maksud didirikan perusahaan ini adalah untuk membuat jaringan transmisi, pendistribusian dan penyaluran tenaga listrik diwilayah Sumatra Utara.

Akhirnya dapat dirasakan bahwa hadirnya perusahaan listrik didaerah ini adalah sebagai wahana alih teknologi dan pemerataan pembangunan disegala bidang di Indonesia umumnya dan manfaatnya yang besar bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang perekonomian bangsa.

3. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan mempunyai tujuan, dan guna mencapai tujuan yang diharapkan, maka perusahaan membentuk wadah disebut organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab PT. PLN Wilayah Sumatera Utara dalam menjalankan operasinya, maka organisasi perusahaan disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga setiap personil yang ada dapat bekerja secara efisiensi dan efektivitas. Susunan organisasi di dalam perusahaan disebut juga dengan struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah gambaran skematis tentang hubungan kerja sama antara orang-orang yang terdapat pada suatu badan usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu dengan penciptaan struktur organisasi diharapkan para karyawan dapat bekerja sesuai dengan bidang dan urusannya dan pimpinan dapat mengkoordinir seluruh aktivitas di perusahaan.

Struktur organisasi pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara adalah menunjukkan tipe struktur organisasi garis dan staff. Dalam struktur organisasi dan staff ini terdapat beberapa orang staff yang berfungsi sebagai orang yang ahli dalam bidang tertentu, bertugas memberi pendapat dalam bidangnya kepada pemimpin di dalam suatu organisasi. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Pemimpin Wilayah yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

Merespon, memimpin dan mengelola wilayah sesuai dengan maksud dan tujuan

wilayah dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari wilayah.

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan wilayah.
3. Mewakili wilayah di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus wilayah yang telah digariskan oleh Direksi.
5. Menetapkan kebijaksanaan wilayah sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh direksi.
6. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan wilayah lengkap dengan anggaran keuangan.
7. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan.
8. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menetapkan kebijaksanaan wilayah di bidang perencanaan, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, pengusahaan sarana penyediaan tenaga listrik dan sumber daya manusia.
10. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan wilayah berdasarkan kebijaksanaan direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputy Pemimpin dan Kepala Kontrol

12. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan direksi dalam rangka mengembangkan sarana penyediaan tenaga listrik.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin wilayah dibantu oleh satu Kepala Kontrol Intern yang setingkat dengan Deputy Pemimpin dan lima Deputy Pemimpin. Fungsi atau uraian tugas dari Kepala Kontrol Intern dan para Deputy Pemimpin adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kontrol Intern

Mempunyai tugas untuk membantu pemimpin dalam mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas sistem pengendalian manajemen wilayah dan pelaksanaannya serta memberikan laporan dan saran perbaikannya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Kontrol Intern mempunyai fungsi :

- Pemeriksaan dan penilaian sistem pengendalian manajemen wilayah dan pelaksanaannya di bidang pembangunan dan pemugaran, pengoperasian, pemeliharaan dan perbekalan sarana penyediaan tenaga listrik.
- Pemeriksaan dan penilaian sistem pengendalian manajemen distribusi dan pelaksanaannya di bidang organisasi, kepegawaian, tata laksana perundang-undangan, sarana kerja keuangan pembangunan dan pemugaran berikut perusahaan sarana penyediaan tenaga listrik.

2. Deputy Pemimpin Bidang Perencanaan.

Mempunyai tugas pokok yaitu menyusun dan menyiapkan rencana wilayah, menganalisa dan meramalkan kebutuhan tenaga listrik, merencanakan pemasaran

dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik berikut sarana kerjanya, penyusunan proyeksi keuangan wilayah jangka pendek, menengah dan panjang serta pengevaluasian efektivitas kinerja wilayah, serta membuat laporannya.

3. Deputy Pemimpin Bidang Konstruksi.

Mempunyai tugas untuk mengelola pembangunan dan pemugaran sarana penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik, merencanakan dan membina pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik, melaksanakan dan mengawasi kegiatan konstruksi penyediaan tenaga listrik, merencanakan, menegndalikan dan membina pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi untuk pembangunan dan pemugaran sarana penyediaan tenaga listrik, pengevaluasian kegiatan-kegiatan bidang konstruksi dan membuat laporannya.

4. Deputy Pemimpin Bidang Pengusahaan.

Mempunyai tugas untuk merencanakan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan, merencanakan pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana penyediaan tenaga listrik, pengendalian dan pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi, merencanakan dan membina pengusahaan listrik pedesaan, mengendalikan perbekalan untuk pengoperasian mesin pembangkit listrik pedesaan, mengevaluasi pelaksanaannya dan membuat laporan dalam bidangnya.

5. Deputy Pemimpin Bidang Keuangan.

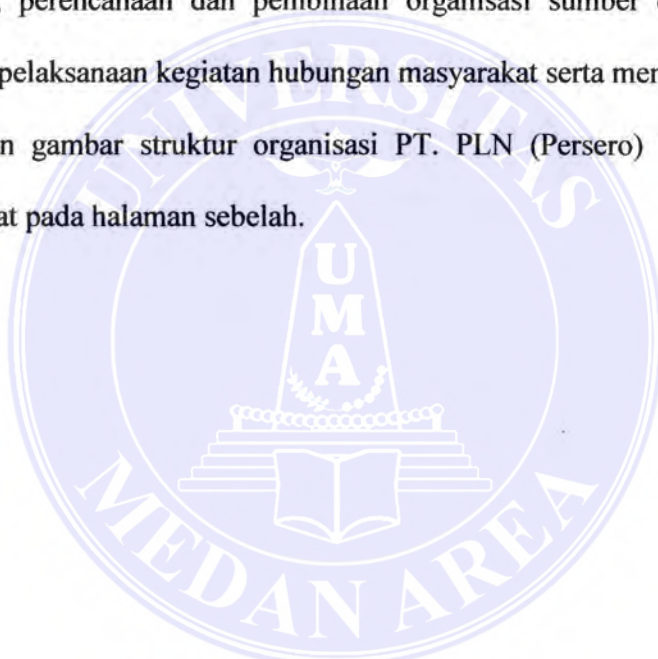
Mempunyai tugas untuk menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi perusahaan, pembangunan dan

pemugaran sarana tenaga listrik, membina tata usaha langganan dan penjualan tenaga listrik dan menyusun laporan keuangannya.

6. Deputy Pemimpin Bidang Kepegawaian Administrasi

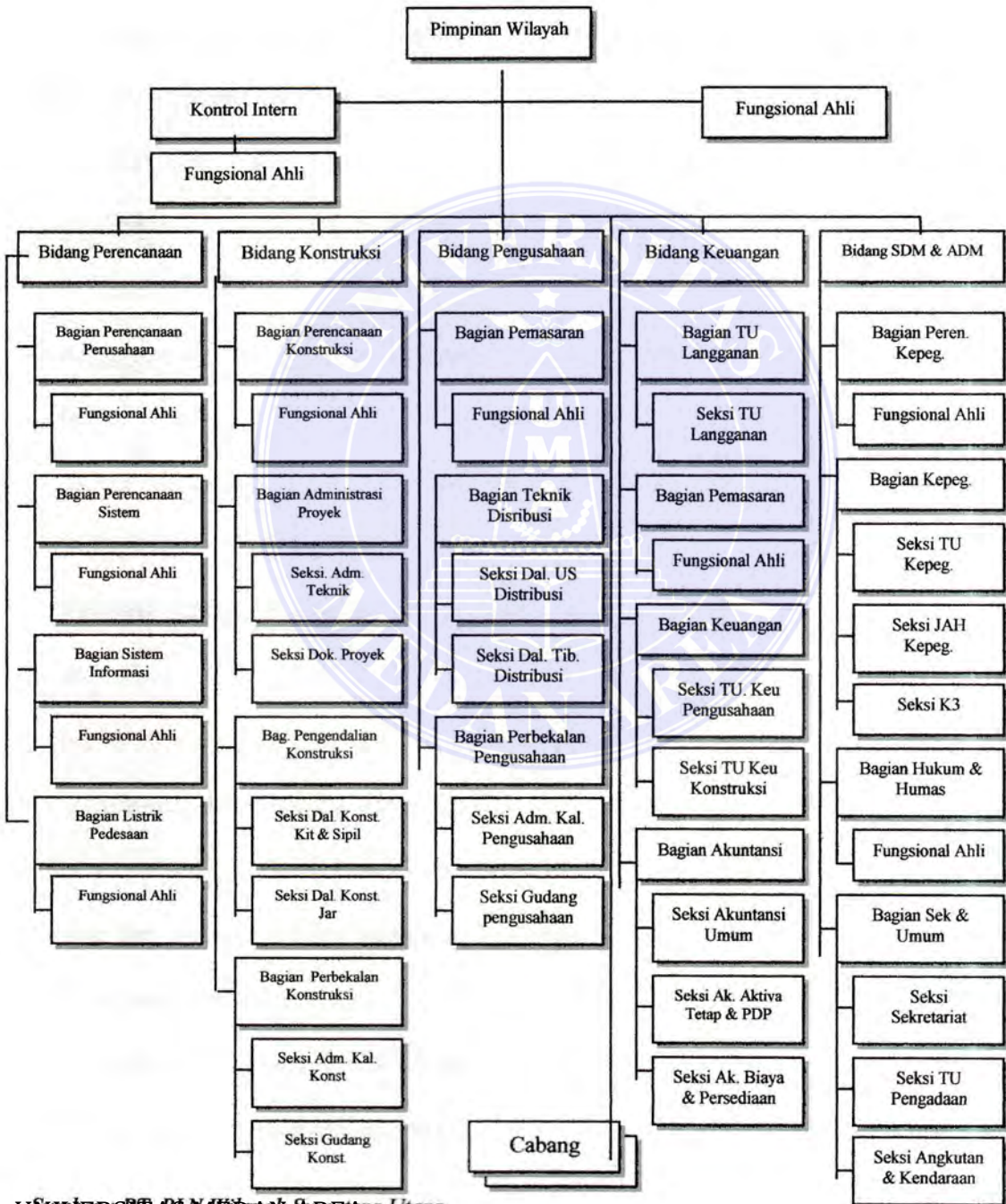
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian dan administrasi secara keseluruhan sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin, mencakup bidang tata usaha kepegawaian, perencanaan dan pembinaan organisasi sumber daya manusia dan sarana kerja, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat serta membuat laporannya.

Sedangkan gambar struktur organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dapat dilihat pada halaman sebelah.



Gambar 1

Struktur Organisasi PT. PLN Wilayah Sumatera Utara



B. Penyusunan Anggaran Pendapatan

Sebagaimana diketahui baik secara teoritis maupun praktis bahwa setiap perusahaan harus mempunyai suatu perencanaan yang baik, supaya tujuan perusahaan dapat dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan salah satu anggaran yang sangat penting bagi perusahaan. Jenis anggaran yang terdapat pada Perusahaan Umum Listrik Negara ada dua, yaitu Anggaran Operasi dan Anggaran Investasi. Dalam rangka pengendalian atas anggaran ini maka Perusahaan Umum Listrik Negara menetapkan suatu aturan-aturan pokok yaitu :

- Anggaran Operasi maupun Anggaran Investasi disusun untuk jangka waktu satu tahun
- Tahun buku anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI) untuk dievaluasi dan diadakan koreksi seperlunya, selanjutnya PLN wilayah meneruskannya ke PLN Pusat.

Peraturan-peraturan itu harus diperhatikan oleh PLN Wilayah Sumatera Utara di dalam merencanakan dan menyusun anggaran. Untuk PLN Wilayah, Rencana Anggaran Operasi dan Investasi adalah merupakan gabungan dengan masing-masing ranting yang terdapat pada lingkungan.

Dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Operasi dan Usulan Anggaran Investasi seksi-seksi yang terlibat adalah :

- Seksi Perencanaan
- Seksi Keuangan dan Pembukuan
- Ranting

Seksi Perencanaan akan mengisi formulir-formulir RAO dan UAI sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu RAO dan UAI dari masing-masing bagian ini akan diproses lebih lanjut oleh seksi Keuangan dan menjadikannya sebagai RAO dan UAI untuk keseluruhan PLN Wilayah Sumatera Utara.

Adapun formulir-formulir RAO yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Operasi tersebut adalah :

- RAO 1 : Ringkasan Penghasilan
- RAO 2 : Ringkasan Pendapatan dan Biaya
- RAO 3 : Pendapatan Operasi
- RAO 4 : Pembelian Tenaga Listrik
- RAO 5 : Fungsi PLTA
- RAO 6 : Fungsi PLTU
- RAO 7 : Fungsi PLTD
- RAO 8 : Fungsi PLTG
- RAO 9 : Fungsi PLTP
- RAO 10 : Fungsi Transmisi
- RAO 11 : Fungsi Teleinformasi Data
- RAO 12 : Fungsi Distribusi
- RAO 13 : Fungsi Tata Usaha Lingkungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/24

- RAO 14 : Fungsi Tata Usaha Kantor Pusat
- RAO 15 : Fungsi Tata Usaha Bukan Kantor Pusat
- RAO 16 : Fungsi Gudang dan Persediaan Bahan-bahan
- RAO 17 : Fungsi Bengkel
- RAO 18 : Fungsi Laboratorium
- RAO 19 : Fungsi Jasa-jasa Teknik
- RAO 20 : Fungsi Wisma dan Rumah Dinas
- RAO 21 : Fungsi Telekomunikasi
- RAO 22 : Fungsi Rupa-rupa Jasa Umum
- RAO 23 : Fungsi Pendidikan dan Latihan
- RAO 24 : Rincian Unsur-unsur Biaya Pegawai
- RAO 25 : Rincian Unsur-unsur Biaya Pemeliharaan
- RAO 26 : Rincian Unsur-unsur Administrasi
- RAO 27 : Ikhtisar Jumlah kwh
- RAO 28 : Rincian Beban dan Hasil-hasil di Luar Operasi

Rencana Anggaran Operasi (RAO) bersama-sama dengan Usulan Anggaran Investasi (UAI) yang merupakan hasil konsolidasi dari rencana anggaran operasi maupun usulan anggaran investasi dengan masing-masing seksi tersebut kemudian diajukan kepada pimpinan wilayah. Selanjutnya PLN wilayah mengevaluasi dan merevisi kembali RAO dan UAI tersebut sebelum disampaikan kepada Direksi di kantor pusat. Kemudian PLN pusat mengajukannya lagi kepada Pemerintah Cq. Menteri

Pertambangan dan Energi. Apabila telah disetujui oleh pemerintah maka Rencana

Anggaran Operasi dan Usulan Anggaran Investasi tersebut menjadi anggaran operasi (AO) dan anggaran investasi (AI) yang akan digunakan sebagai pedoman kerja oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumut Medan.

Penyusunan anggaran laba rugi dan biaya perusahaan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dilakukan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan perusahaan adalah hasil yang diharapkan dapat direalisasi dari penjualan tenaga listrik dan pendapatan lain-lain selama setahun.

Jumlah penjualan tenaga listrik ditentukan oleh beberapa hal, yaitu :

a. Jenis Pelanggan

Jenis pelanggan akan menentukan golongan tarif yang dibebankan untuk setiap kwh pemakaian tenaga listrik. Penggolongan pelanggan tersebut adalah sebagai berikut :

- S1: Sosial sampai dengan 200 VA
- S2: Sosial 201 VA sampai dengan 2200 VA
- S3: Sosial 2201 VA sampai dengan 200 kVA
- S4: Sosial lebih besar dari 201 kVA
- R1: Rumah tangga 250 VA sampai dengan 500 VA
- R2: Rumah tangga 501 VA sampai dengan 2200 VA
- R3: Rumah tangga 2201 VA sampai 6600 VA
- R4: Rumah tangga lebih besar dari 6601 VA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/24

- U1: Usaha 250 VA sampai dengan 2200 VA
- U2: Usaha 2201 VA sampai dengan 200 kVA
- U3: Usaha lebih besar dari 201 kVA
- U4: Usaha lebih besar dari 10.000 kVA
- H1: Hotel 250 kVA sampai dengan 10.000 kVA
- H2: Hotel 100 kVA sampai dengan 2200 kVA
- I1 : Industri 450 VA sampai dengan 2200 VA
- I2 : Industri 2201 VA sampai dengan 13,9 kVA
- I3 : Industri 14 kVA sampai dengan 200 kVA
- I4 : Industri lebih besar dari 201 kVA
- G1: Gedung Pemerintah 250 VA sampai dengan 200 kVA
- G2: Gedung Pemerintah Lebih besar dari 201 kVA
- J : Penerangan jalan umum

b. Jumlah tenaga listrik (kwh) yang dikonsumsi oleh setiap golongan pelanggan

Dalam hal menetapkan besarnya anggaran pendapatan yang bersumber dari penjualan listrik ini. PLN Wilayah Sumatera Utara melakukannya berdasarkan perkalian dari jumlah tenaga listrik (kwh) yang direncanakan terjual untuk setiap golongan.

Anggaran pendapatan operasi berasal dari penjualan tenaga listrik tahun 2002 yang disusun oleh PT. PLN (Persero) Wilayah. Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel – 1.

Pendapatan operasi di luar dari penjualan tenaga listrik adalah sebagai berikut :

- Pendapatan dari Biaya Penyambungan
- Pendapatan dari biaya perubahan tarif
- Pendapatan dari sewa transformator, instalasi dan alat-alat lainnya
- Pendapatan dari denda atas keterlambatan pembayaran rekening listrik
- Dan lain-lain



Tabel – 1

PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Anggaran Penjualan Tenaga Listrik 2002

Golongan	Unit T. Listrik (kwh)	Tarif (Rp./kwh)	Jumlah (Rp.)
S1	750.000	54,98	41.235.000
S2	2.825.000	74,00	209.050.000
S3	2.415.000	90,60	218.799.000
S4	220.000	225,40	49.588.000
R1	87.415.000	99,35	8.684.680.250
R2	33.680.000	123,86	4.171.604.800
R3	1.397.000	248,00	346.456.000
R4	375.000	236,00	126.000.000
U1	9.830.000	196,35	1.930.120.500
U2	8.002.000	270,72	2.166.301.550
U3	865.000	476,58	412.971.700
U4	58.000	520,65	30.197.700
H1	2.278.000	112,50	279.055.000
H2	426.000	183,00	77.958.000
I1	18.000	106,95	1.925.100
I2	498.000	118,36	58.470.000
I3	29.617.000	152,79	4.525.181.500
I4	80.364.000	121,63	9.774.673.400
G1	3.685.000	202,17	774.996.500
G2	412.000	164,41	67.737.000
J	8.200.000	124,04	1.017.128.000
JUMLAH	273.326.000		34.934.129.000

Sumber : Kantor PT. PLN. (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara hanya memperhitungkan pendapatan yang berasal dari biaya penyambungan sebagai pendapatan operasi di luar dari penjualan tenaga listrik. Hal ini disebabkan untuk pendapatan seperti pendapatan dari sewa, denda dan lain-lain sulit untuk diramalkan jumlahnya melalui pendekatan-pendekatan statistik maupun melalui pertimbangan pimpinan perusahaan.

Suatu biaya penyambungan akan diakui sebagai pendapatan seluruhnya setelah 20 tahun. Dengan kata lain biaya penyambungan akan diamortisasi menjadi pendapatan setiap tahunnya 5 % dari total biaya penyambungan atau rumus sebagai berikut :

$$X = 5 \% \times T$$

Dimana : X adalah jumlah pendapatan biaya penyambungan

T adalah total biaya penyambungan sebelum diamortisasi.

Anggaran pendapatan lain-lain pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tahun anggaran 2002 dilihat pada tabel – 3.

Tabel – 2

PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Pendapatan Biaya Penyambungan 2002

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Pendapatan biaya penyambungan (BP)	320.850.000

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tabel – 3
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Anggaran Pendapatan Lain-lain 2002

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran rekening	0
Pendapatan sewa	180.000.000
J U M L A H	180.000.000

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wil. Sumatera Utara

2. Anggaran Biaya Operasi

Biaya-biaya yang ada pada Perusahaan Umum Listrik Negara secara umum digolongkan atas dua yaitu biaya operasi dan biaya investasi.

Berdasarkan surat edaran PLN Pusat No. 044/PSR/79 tertanggal 24 November 1979, yang dimaksud dengan biaya operasi adalah sebagai berikut :

Biaya operasi semua biaya yang dikeluarkan yang pada hakekatnya dianggap habis dalam masa satu tahun buku. Didalamnya termasuk segala biaya pemeliharaan suatu aktiva tetap dan peralatan milik perusahaan serta pergantian bagian-bagian aktiva dan peralatan tersebut untuk mempertahankan norma-norma teknis yang ada. Begitu pula biaya perolehan aktiva yang dinilainya dianggap kurang berarti atau dianggap mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun.

Dalam rangka merencanakan dan menyusun anggaran biaya operasi, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara membedakan biaya operasi tersebut berdasarkan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/24

- Jenis biaya atau objek pengeluaran biaya, dan
- Fungsi-fungsi

Pembagian biaya operasi berdasarkan jenis biaya atau objek dari pengeluaran biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan/terjadi untuk keperluan-keperluan berikut :

a. Biaya Bahan Bakar dan Minyak Pelumas

Biaya ini adalah merupakan pengeluaran yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk pengadaan bahan bakar untuk keperluan operasi perusahaan, baik untuk persediaan maupun pemakaian langsung termasuk juga pengangkutan dari gudang/tempat penjualan sampai ke gudang PLN. Besar anggaran direncanakan berdasarkan kebutuhan baik untuk pemakaian maupun untuk persediaan. Yang termasuk ke dalam biaya ini adalah :

- HSD
- IDO
- RESIDU
- Minyak pelumas
- Gas alam
- Batubara
- Panas bumi
- Air

Anggaran biaya bahan bakar dan minyak pelumas pada PT. PLN (Persero)

Wilayah Sumatera Utara tahun anggaran 2002 dapat dilita pada tabel – 4.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/24

b. Biaya pemeliharaan

Biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan pemeliharaan mesin-mesin pembangkit, kendaraan bermotor, pemakaian material pemeliharaan serta seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (jasa/borongan).

Tabel – 4

PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Anggaran Biaya Bahan Bakar dan Minyak Pelumas 2002
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	PLTA		PLTU		PLTD		PLTG		PLTP	
	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
Bahan bakar minyak :										
HSD	0	0	0	0	11.340	0	0	0	0	0
IDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minyak Pelumas	0	0	0	0	103.300	0	0	0	0	0
Gas Alam (1000 BTU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panas Bumi (Mwh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	0	0	0	0	114.640	0	0	0	0	0

Sumber : Kantor PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Yang termasuk dalam biaya pemeliharaan tersebut adalah :

- Spareparts untuk mesin-mesin pembangkitan dan untuk kendaraan bermotor.
- Material pemeliharaan, antara lain transformator, switchgear dan jaringan, kabel, alat pengukur/pembatas/control, bahan bakar/minyak pelumas untuk kendaraan bermotor serta material lainnya untuk pemelihara bangunan, halaman serta perlengkapan.
- Jasa/borongan, adalah pekerjaan pihak ketiga untuk pemeliharaan tanah, gedung dan kelengkapan halaman pemeliharaan mesin pembangkitan serta perlengkapannya, biaya kendaraan bermotor dan pemeliharaan perlengkapan umum.

Anggaran biaya pemeliharaan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tahun 2002 dapat dilihat pada tabel – 5.

c. Biaya kepegawaian

Biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan pegawai, baik untuk pegawai tetap maupun tenaga harian.

Anggaran biaya kepegawaian ini disusun berdasarkan keadaan masa lalu disertai dengan penyesuaian-penyesuaian atas kebijaksanaan pimpinan terhadap gaji, upah, tunjangan serta jumlah pegawai untuk masa yang akan datang.

Anggaran biaya kepegawaian PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tahun anggaran 2002 dapat dilihat pada tabel – 6.

Tabel – 5**PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara****Anggaran Biaya Pemeliharaan 2002****(dalam Ribuan Rupiah)**

FUNGSI	Material	Jasa/Borongan	Jumlah
Pembangkitan : PLTA	0	0	0
Pembangkitan : PLTU	0	0	0
Pembangkitan : PLTD	139.680	70.004	209.684
Pembangkitan : PLTG	0	0	0
Pembangkitan : PLTP	0	0	0
Sistem Transmisi	0	0	0
Sistem Teleinformasi Data	0	0	0
Sistem Distribusi	17.507	702.257	719.764
Tata Usaha Langganan	476	14.547	15.023
Tata Usaha	306	51.345	51.651
Gudang & Persediaan Bahan	342	4.428	4.770
Bengkel	0	0	0
Laboratorium	0	0	0
Jasa-jasa Teknik	0	0	0
Wisma & Rumah Dinas	0	0	0
Telekomunikasi	0	0	0
Rupa-rupa Jasa Umum	0	0	0
Pendidikan & Latihan	0	0	0
JUMLAH	158.311	842.581	1.000.892

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wil. Sumatera Utara

Tabel – 6
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Anggaran Biaya Kepegawaian 2002
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Gaji bruto	1.154.500
Upah	44.423
Beban pajak	20.816
Tunjangan bahan pokok	142.654
Tunjangan kompensasi karya	205.132
Tunjangan jabatan	146.718
Upah lembur	28.361
Premi piket, pencatatan meteran dan penagihan	24.812
Asuransi pegawai	0
Cuti tahunan dan besar	70.943
Pakaian dinas	35.422
Perawatan kesehatan	237.653
Tunjangan listrik	119.187
Rupa-rupa biaya pegawai	71.035
Uang makan lembur	35.838
Pendidikan dan latihan	0
JUMLAH	2.337.484

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wil. Sumatera Utara

d. Biaya Penyusutan

Penyusutan aktiva tetap dihitung berdasarkan masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan. Masa manfaat aktiva tetap itu tertuang dalam SK Direksi.

Anggaran biaya penyusutan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tahun anggaran 2002 dapat dilihat pada tabel – 7.

e. Biaya Umum dan Administrasi

Anggaran biaya umum dan administrasi ini meliputi biaya untuk keperluan: honorarium, pemakaian perkakas dan perlengkapan, bahan makanan, biaya pengolahan data dan penagihan, rupa-rupa persediaan, dan biaya dan servis kecil

Anggaran biaya umum dan administrasi PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara dapat dilihat pada tabel – 8

f. Biaya lain-lain

Biaya yang harus diperhitungkan selain dari pada biaya diatas dan digolongkan dalam biaya lain-lain.

Anggaran pendapatan atau biaya lain-lain PT. PLN (Persero) Wilayah. Sumatera Utara tahun anggaran 2002 dapat dilihat pada tabel – 9.

3. Anggaran laba rugi

Anggaran laba rugi merupakan gabungan dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran laba rugi menunjukkan besarnya pendapatan yang akan diperoleh serta besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan tersebut.

Anggaran laba rugi pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara tahun anggaran 2002 dapat dilihat pada tabel – 11

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tabel – 7**PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara****Anggaran Biaya Penyusutan 2002****(dalam ribuan rupiah)**

FUNGSI	Jumlah
Pembangkitan : PLTA	0
Pembangkitan : PLTU	0
Pembangkitan : PLTD	307.062.000
Pembangkitan : PLTG	0
Pembangkitan : PLTP	0
Sistem Transmisi	0
Sistem Teleinformasi Data	0
Sistem Distribusi	682.411.000
Tata Usaha Langgan	6.125.000
Tata Usaha	24.371.000
Gudang & Persediaan Bahan	5.681.000
Bengkel	0
Laboratorium	0
Jasa-jasa Teknik	0
Wisma & Rumah Dinas	0
Telekomunikasi	0
Rupa-rupa Jasa Umum	0
Pendidikan & Latihan	0
JUMLAH	1.025.650.000

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tabel – 8
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Anggaran Biaya Umum dan Administrasi 2002
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Honorarium	0
Pemakaian perkakas dan perlengkapan	0
Bahan makanan	0
Biaya pengolahan data penagihan	127.235.000
Rupa-rupa persediaan biaya dan servis kecil :	
- Biaya hansip / keamanan	1.894.000
- Konsumsi	32.759.000
- Perjalanan Dinas	65.952.000
- Pos, telegram dan telepon	17.973.000
- Pemakaian listrik, gas dan air	2.848.000
- Sewa gedung dan tanah	6.200.000
- Alat dan keperluan kantor	42.287.000
- Biaya bank	22.642.000
- Pajak	87.617.000
- Asuransi	0
- Iuran, iklan	5.597.000
- Penerbitan / ekshibisi	37.364.000
- Lain-lain	3.164.000
JUMLAH	454.770.000

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wil. Sumatera Utara

Tabel – 9**PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara****Ikhtisar Anggaran Biaya Operasi 2002****(dalam ribuan rupiah)**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Pemakaian Bahan Bakar / Minyak Pelumas :	
- Bahan Bakar Minyak	3.548.110.000
- Minyak Pelumas	244.629.000
- Gas Alam	0
- Batubara	0
- Panas Bumi	0
Biaya Pemeliharaan :	
- Pemakaian Material	158.311.000
- Jasa / Borongan	842.581.000
Biaya Pegawai	2.337.484.000
Biaya Administrasi & Umum	454.000.000
Biaya Penyusutan	1.025.650.000
JUMLAH	8.611.535.000

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Tabel – 10
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
Anggaran Pendapatan/Beban Diluar Operasi 2002
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Biaya penelitian	0
Hasil penarikan kembali aktiva tetap	20.500.000
Hasil pekerjaan pihak ketiga	0
Biaya penyisihan material pemeliharaan	(7.650.000)
Pendapatan Bunga / jasa giro	55.700.000
Premi pemungutan PJU	4.450.000
Pendapatan denda	9.800.000
Hasil lelang besi tua	0
Biaya pensiun	(159.500.000)
Lain-lain	0
JUMLAH	(76.700.000)

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wil. Sumatera Utara

Tabel – 11**PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara****Ikhtisar Anggaran Rugi Laba 2002****(dalam ribuan rupiah)**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
PENDAPATAN OPERASI	
- Penjualan tenaga listrik	34.934.129
- Pendapatan biaya penyambungan	320.850
- Pendapatan Lain-lain	180.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI	35.434.979
BIAYA OPERASI	
- Biaya bahan & minyak pelumas	3.792.739
- Biaya pemeliharaan	1.000.892
- Biaya kepegawaian	2.337.484
- Biaya penyusutan	1.025.650
- Biaya umum & administrasi	454.770
JUMLAH BIAYA OPERASI	8.611.535
LABA OPERASI	26.823.444
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR OPERASI	(76.700)
LABA (RUGI)	26.746.744

Sumber : Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

C. Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi anggaran ini dituangkan ke dalam dua bentuk laporan, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran Tunai (RAT)

Laporan ini berisi uraian tentang penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas sehubungan dengan kegiatan operasi maupun investasi perusahaan. Laporan ini disusun setiap bulan berdasarkan kas yang diterima dan dikeluarkan dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

Laporan RAT ini terbatas untuk kegiatan yang berhubungan dengan arus kas, sehingga laporan ini tidak mencakup keseluruhan pelaksanaan anggaran, misalnya anggaran penyusutan. Namun demikian laporan RAT ini memungkinkan informasi yang lebih tinggi tingkat kepastiannya dibandingkan dengan laporan pembukuan dalam mengukur realisasi dari anggaran.

2. Laporan pembukuan

Laporan ini mempunyai bentuk yang sama dengan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Laporan ini disusun setiap bulan dan dilaporkan tiap triwulan. Penyusunan dari laporan pembukuan ini didasarkan pada kebijaksanaan akuntansi yang dianut oleh baik kegiatan operasi maupun investasi.

Dengan demikian melalui laporan pembukuan ini dapat diukur besarnya mutasi untuk masing-masing perkiraan sebagai akibat kegiatan operasi maupun investasi. Melalui pengukuran atas mutasi yang terjadi, secara tidak langsung diukur beberapa realisasi dari anggaran.

D. Peranan Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengawasan

Salah satu fungsi manajemen yang harus diperhatikan dan dilaksanakan adalah fungsi pengawasan. Pengawasan berperan untuk memastikan apakah pelaksanaan telah berjalan seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan pendapatan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran. Pada sistem ini, pengawasan lebih ditekankan pada penyimpangan anggaran pendapatan. Sedangkan hal lain yang telah sesuai dengan anggaran/rencana dapat dikesampingkan dahulu. Dengan kata lain perhatian lebih diarahkan pada penyebab terjadinya penyimpangan serta tindakan untuk memperbaikinya. Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan berfungsi sebagai laporan realisasi. Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan disusun setiap akhir tahun.

Pada PT. PLN (Persero), Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dilakukan oleh bagian keuangan yang mengurus masalah anggaran pendapatan. Hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bagian yang merupakan pusat biaya, yaitu :

1. Pos penerimaan adalah jumlah penerimaan operasi dari investasi yang ditetapkan dalam anggaran sebagai target yang harus dicapai pada bagian tersebut.
2. Pos pengeluaran adalah pengeluaran operasi, investasi dan lain-lain yang ditetapkan dalam anggaran merupakan planfond (batas maksimum) yang dapat direalisasi oleh bagian yang bersangkutan sesuai dengan perincian dari sub pos

anggaran tersebut
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bila terjadi penyimpangan positif akan diterapkan untuk kegiatan serupa pada masa yang akan datang dan sebab-sebab penyimpangan negatif akan ditanggulangi agar tidak terjadi pada periode yang akan datang.

Bagian penjualan berperan sebagai penggerak untuk bagian lain dalam perusahaan jasa ini. Bagian penjualan harus diperhatikan dan diawasi secara terus menerus agar anggaran pendapatan yang telah disusun dapat direalisasikan. Setelah laporan pelaksanaan penjualan dan biaya-biaya yang dianalisis maka langkah terakhir yang ditempuh adalah dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya. Hal ini perlu untuk mengetahui berapa besar penyimpangan yang terjadi dari laporan perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa anggaran menggambarkan jalan kearah yang ingin dicapai dan anggaran itu tidak dapat mencegah adanya penyimpangan atau menjamin pencapaian tujuan, maka pengawasan sangat perlu agar aktivitas selalu berada pada arah yang ditentukan. Fungsi anggaran adalah menggambarkan hasil segala kegiatan. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pada perusahaan cukup baik, karena anggaran dipergunakan sebagai batasan untuk pos penerimaan maupun pengeluaran. Dengan adanya fungsi anggaran sebagai batasan terhadap penerimaan dan pengeluaran makasetiap bagian akan berusaha seefektif mungkin agar mencapai target yang maksimal.

Untuk itu aspek pengawasan anggaran pendapatan yang harus dilakukan adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Mengontrol Pengeluaran operasi agar tidak melebihi batasan yang diperbolehkan oleh anggaran.
- Mengontrol kegiatan penerimaan operasi agar dapat mencapai target semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui adanya batasan yang diberikan dalam anggaran tersebut dipenuhi maka PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 bulan. Laporan ini disebut Laporan Realisasi Anggaran Tunai Triwulan dan Laporan Pembukuan Triwulan yang merupakan laporan dari setiap bagian dari kegiatannya.

Dari analisa perbandingan antara anggaran dan realisasi pada laporan triwulan, pimpinan perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan selama periode tersebut dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan dan melakukan tindakan perbaikan.

Dengan demikian melalui tindakan ini, upaya pencegahan terhadap timbulnya penyimpangan serta perbaikan terhadap penyimpangan akan meluruskan jalannya operasi perusahaan kearah yang diinginkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, baik uraian teoritis, hasil penelitian dan analisis, maka dalam bab terakhir dari skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa secara umum Fungsi Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengawasan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik, dengan alasan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi perusahaan ini cukup baik, karena di dalam perusahaan ini tidak terdapat lagi bagian yang berfungsi ganda. Setiap bagian dalam perusahaan telah bekerja dan bertanggungjawab sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan dan setiap bagian dalam organisasi mempunyai batas-batas wewenang tertentu.
2. Prosedur penyusunan anggaran yang diikuti perusahaan secara teoritis sudah baik, karena selalu dihubungkan dengan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan serta factor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran.
3. Anggaran operasi perusahaan ini disusun untuk suatu periode yang dimulai 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya dengan memakai prosedur penyusunan proses manajemen. Dimana penyusunan anggaran telah melibatkan berbagai personalia dari berbagai fungsi operasional perusahaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/3/24

4. Anggaran Pendapatan Perusahaan ini meliputi, anggaran pendapatan operasi, anggaran biaya operasi dan anggaran pendapatan (biaya diluar operasi).
5. Mekanisme pelaporan atas pelaksanaan anggaran terdiri dari dua jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tunai dan Laporan Pembukuan yang disusun atas akrual basis. Tujuan dari penggunaan kedua laporan ini adalah sebagai alat pengawasan dan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara kas.
6. Pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan pada perusahaan terhadap kegiatan perusahaan secara teoritis sudah tepat. Setelah perusahaan menetapkan anggaran sebagai pedoman bagi setiap karyawan untuk beraktivitas, secara regular perusahaan membandingkan hasil pelaksanaan dengan anggaran, sehingga dapat segera diketahui apabila ada terjadi penyimpangan untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan.

Namun disamping kebaikan-kebaikan yang tersebut di atas, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :

1. Penyusunan anggaran laba rugi pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ini hanya menggunakan angka-angka yang merupakan taksiran yang wajar. Perusahaan tidak menggunakan biaya standar sehingga terjadi penyimpangan yang cukup besar antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan, hal ini tentu tidak efisien bagi perusahaan.
2. Perusahaan tidak berhasil mencapai tingkat laba, yaitu berada di bawah jumlah yang dianggarkan bahkan mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena pada tahun sebelumnya pun perusahaan sudah mengalami kerugian.

B. Saran

1. Perusahaan sebaiknya menerapkan secara konsisten rumus yang berlaku dalam mengakui pendapatan atas biaya penyambungan untuk periode-periode berikutnya agar tidak terjadi variance yang jumlahnya sangat mencolok.
2. Sebaiknya perusahaan menggunakan biaya standar dalam penyusunan laba rugi, karena penyusunan anggaran tanpa biaya standar tidak akan memungkinkan perusahaan untuk mencapai sistem pengendalian anggaran yang sebenarnya.
3. Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah untuk memperoleh laba. Hal inilah yang menyebabkan perlu disusun anggaran laba rugi agar bisa diketahui berapa laba yang akan dicapai. Tetapi bila perusahaan sudah mengalami kerugian pada tahun-tahun sebelumnya dan kerugian ini cukup besar maka anggaran sebaiknya disusun dengan tujuan untuk memperkecil kerugian atau menghilangkan kerugian, sesudah kerugian tertutupi selanjutnya bisa disusun anggaran untuk memperoleh laba sehingga tujuan utama perusahaan bisa dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saputra Gunawan, Asri Marwan, *Anggaran Perusahaan*, Edisi Revisi II, Cetakan kelima, Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1996.
- Charles T. Horngren, *Introduction to Management Accounting*, Fifth Edition, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1994.
- E. Hartanto, *Akuntansi Untuk Usahawan*, Edisi Kelima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Glen A. Welsch, et.all, *Budgeting : Planning and Profit Control, (Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba)*, Terjemahan Purwatiningsih dan Maudy Warouw, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Munandar, *Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, BPFE-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997.
- My, Jain PK Khan, *Management Accounting and Financial Management*, Fifth Edition, Mac. Graw-Hill, Publishing C. Ltd. New Delhi, 1991.
- Robert N. Anthony, *Akuntansi Untuk Manajemen*, Terjemahaan St. Dianjung, Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1991.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Nasution, S. Dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah*, Edisi kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Edisi keempat, Tarsito, Bandung, 1994.